

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2024 yang akan dijadikan pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

Praya, Juli 2023
INSPEKTUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



Drs. H. Lalu Akmal Afandi, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196812311989031065

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Mandat utama Inspektorat sebagai unit kerja dengan fungsi pengawasan internal, merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat diharapkan dapat memberikan

keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan pemerintah, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/ kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kepada Penyelenggara pemerintahan daerah untuk melaksanakan asas-asas pemerintahan dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah. Pelaksanaan

Otonomi tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan otonomi daerah.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi dan desentralisasi secara bersama-sama, dengan penekanan yang bergeser secara dinamis dari waktu ke waktu dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04/M. Pan/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.
16. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 adalah merupakan dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah. Rencana Kerja dalam rangka pendanaan yang bersifat indikatif merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan perkiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target sasaran yang ditetapkan.

Tujuan Renja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sikap akuntabel dan menurunkan derajat penyimpangan terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan.
- b. Meningkatkan responsibilitas lembaga pengawasan terhadap pengaduan masyarakat/laporan penyelewengan ketentuan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Meningkatkan kualitas aparatur pengawasan.

- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun lalu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Kinerja Tujuan dan Sasaran

Hingga akhir Tahun 2022, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun perbandingan capaian indikator kerja utama Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Lombok Tengah

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output)/sub kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu | | | Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan | |
|-------------------|--|---|--|---|--|---|----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 | Targat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 =(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 6.01.02 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase realisasi PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 95% | 3 | 300% |
| 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah | 55% | 30% | 55% | 35% | 64% | 60% | 1.25 | 227% |
| 6.01.02.2.01.0001 | <i>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i> | Laporan Dokumen Hasil Audit | 250 | 250 | 250 | 241 | 96% | 250 | 741 | 296% |
| | <i>Pengawasan Desa</i> | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 127 | 127 | 127 | 127 | 100% | 127 | 381 | 300% |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|----------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| | <i>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i> | | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 300% |
| | <i>Reviu Laporan Kinerja</i> | Laporan Hasil Reviu RKA, Renja, RKPD, LPPD, RPJMD, Renstra, Penyerapan Anggaran, PMPRB | 7 | 7 | 7 | 7 | 100% | 7 | 21 | 300% |
| | <i>Reviu Laporan Keuangan</i> | Laporan Hasil Reviu LKPD, KUA PPAS | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 30 | 300% |
| | <i>Kerjasama Pengawasan Internal</i> | Jumlah Dokumen Audit (Joint Audit) | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 300% |
| | <i>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i> | Rekomendasi yang dtindaklanjuti | 1,250.00 | 1250 | 1250 | 1250 | 100% | 1,250 | 3,750 | 300% |
| 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Persentase pengawasan tujuan tertentu yang terselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3 | 300% |
| | <i>Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</i> | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 1200% | 0 | 12 | 12 | 100% | 12 | 24 | 200% |
| 6.01.02.2.02.0002 | <i>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i> | Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti | 1200% | 0 | 12 | 12 | 100% | 12 | 24 | 200% |

| 6.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP OPD | B Predikat | CC Predikat | B Predikat | B Predikat | B Predikat | B Predikat | B Predikat | B Predikat |
|-------------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Persentase evaluasi SAKIP OPD yang tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3 | 300% |
| 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD | 13 | 13 | 13 | 13 | 100% | 13 | 39 | 300% |
| 6.01.01.2.01.0001 | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | Dokumen perencanaan PD | 2 | 2.00 | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 300% |
| | <i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i> | Dokumen RKA-SKPD | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 300% |
| | <i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i> | Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 300% |
| | <i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i> | DPA-SKPD | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 300% |
| | <i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i> | Perubahan DPA-SKPD | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 300% |
| | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | Laporan kinerja SKPD (LPPD, LKjIP, Lap. Penyerapan Anggaran Triwulan, Lap. Pegawai dan Aset) | 7 | 7 | 7 | 7 | 100% | 7 | 21 | 300% |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen administrasi keuangan PD | 19 | 19 | 19 | 19 | 100% | 100% | 39 | 205% |
| 6.01.01.2.02.0001 | <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i> | Gaji dan Tunjangan ASN | 12.00 | 12.00 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 300% |
| | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i> | Laporan keuangan akhir tahun SKPD | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 300% |
| | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i> | Laporan keuangan bulanan | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 300% |
| | | Laporan keuangan triwulanan | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 12 | 300% |
| | | Laporan keuangan semesteran | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 300% |
| 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM Dengan Capaian Kinerja Lebih Dari Sama Dengan 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3 | 300% |
| 6.01.01.2.05.0009 | <i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i> | Peserta diklat JFA dan PPUPD | 192 | 32 | 32 | 40 | 125% | 40 | 112 | 58% |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Laporan administrasi umum PD | 60 | 60 | 60 | 60 | 100% | 60 | 180 | 300% |
| 6.01.01.2.06.0002 | <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i> | Komputer dan perlengkapannya | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100% |
| | | Printer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | Laptop | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | Alat kebersihan | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | 7 | 17 | 340% |
| | | Peralatan dan perlengkapan lainnya | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i> | Laporan Hasil Rapat | 48 | 48 | 48 | 48 | 100% | 48 | 144 | 300% |
| | <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan</i> | Barang cetakan | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | | 4 | 200% |
| | <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> | Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 300% |
| 6.01.01.2.09 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | BMD Tercatat | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 4 | 12 | 300% |
| | <i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i> | Kendaraan dinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | <i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i> | Kendaraan operasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | <i>Pengadaan Mebel</i> | Mebel | 2 | 4 | 4 | 3 | 75% | 4 | 11 | 550% |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| | <i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i> | Sarana gedung kantor | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 26 | 0% |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Layanan pemerintahan daerah | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 300% |
| | <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i> | Layanan internet | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 300% |
| | <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i> | Peralatan dan perlengkapan kantor yang diservice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | BMD Kondisi Baik | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 6 | 300% |
| 6.01.01.2.09.0002 | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i> | Kendaraan dinas terpelihara | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100% |
| | <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i> | Kendaraan operasional terpelihara | 35 | 25 | 25 | 35 | 140% | 25 | 85 | 243% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------|--------|-------|-------|------|------|---|------|
| 6.01.03 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Persentase Perangkat Daerah yang menyusun manajemen risiko dengan kategori Maturitas terdefinisi, terkelola dan terukur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3 | 300% |
| | | Persentase Area Of Improvement (AOI) Kapabilitas APIP yang dipenuhi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3 | 300% |
| | | Persentase Perangkat Daerah Sampel dengan Nilai PMPRB Baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3 | 300% |
| | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | | | | | | | | |
| | <i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan</i> | Jumlah Rekomendasi Pengawasan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | <i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan</i> | Jumlah Rekomendasi Fasilitasi Pengawasan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | Persentase Peningkatan Level Maturitas Pemerintah Daerah | 100% | 77,23% | 80,00 | 84,23 | | | | 0% |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|-------|----|----|----|-------------|------------|-----------|-------------|
| 6.01.03.2.02.0001 | <i>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i> | Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi | 32 | 32 | 32 | 32 | 100% | 32% | 64 | 201% |
| | <i>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i> | Jumlah Dokumen Laporan yang di Evaluasi | 10 | 10 | 10 | 9 | 90% | 10 | 29 | 290% |
| | <i>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i> | Jumlah Laporan Kegiatan Saber Pungli | 1200% | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 36 | 300% |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah dilakukan untuk mengetahui kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dengan indikator yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri, tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja Inspektorat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah. Kedudukan Inspektorat merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tugas yaitu membantu Bupati Lombok Tengah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam upaya mendukung Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengawasan Umum atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dengan peningkatan kapasitas dan intensitas Pengawasan Internal Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah fokus kepada kinerja pelayanan antara lain :

1. Mengutamakan Pengawasan yang bersifat pencegahan (Preventif) dengan mengedepankan pembinaan dari pada tindakan;
2. Mengamankan setiap kebijakan Kepala Daerah terutama terkait dengan program-program prioritas dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Membuka Konsultasi dan solusi atas problematik penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah sehubungan dengan peran Inspektorat Daerah menjadi *Quality Assurance*;

4. Pengawasan bersifat kuratif (penanganan/tindakan) apabila upaya maksimal sudah tidak mencapai hasil;
5. Cepat tanggap, cepat temu dan cepat tuntas atas setiap permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun secara teknis dan operasional, dalam melaksanakan kinerja pelayanan sesuai dengan fungsi pengawasan setiap tahun dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang meliputi antara lain :

Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023 disusun berdasarkan prioritas dan risiko, meliputi :

1. Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Fokus dan sasaran Pemeriksaan kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023 yaitu mendasari Register Resiko yang tertuang dalam Rencana Tindak Pengendalain (RTP) Strategis Pemerintah Daerah, RTP Strategis Perangkat Daerah dan RTP Operasional OPD;
 - b. Menilai aspek 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis) yaitu APIP berperan dalam memberi nilai tambah terhadap efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan program/kegiatan dengan cara yang lebih sistematis;
2. Pemeriksaan Ketaatan Keuangan Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menggunakan sumber daya yang dibiayai oleh APBD maupun Sumber Keuangan Lain dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama periode tertentu. Tujuan Pemeriksaan Operasional Keuangan adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa

pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, yaitu pemeriksaan sesuai dengan ruang lingkup, tujuan serta sasaran yang akan dilakukan pemeriksaan meliputi :

- 1) Probit Audit;
- 2) Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa;
- 3) Pemeriksaan Investigasi;
- 4) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah;
- 5) Pemeriksaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
- 6) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu lainnya.

4. Pengawasan Mandatori

Merupakan kegiatan pengawasan yang diberikan tanggung jawab oleh Instansi Pusat / Instansi Vertikal atau Aparat Pengawas Lain yang bersifat wajib harus dilaksanakan, meliputi :

- a. Reviu Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah (Reviu RPJMD, Reviu RKPD, Reviu RKA);
- b. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. Reviu Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. Reviu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)
- e. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
- f. Reviu penyerapan anggaran, pengadaan barang/jasa pemerintah dan penyaluran dana desa;
- g. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- h. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- i. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korpsugah);

- j. Koordinasi Penilaian Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah);
5. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan klarifikasi, verifikasi, investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat/permintaan lembaga/instansi terkait maupun Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan investigasi maupun Bantuan Perhitungan Kerugian Negara, dengan fokus :
- a. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - b. Penyalahgunaan wewenang;
 - c. Hambatan dalam pelayanan publik;
 - d. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat.
6. Pengawasan Prioritas Nasional Pengawasan prioritas nasional meliputi :
- a. Pemantauan, Pemeriksaan dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - b. Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Pengawasan Reformasi Birokrasi dan *Good Governance*, dengan fokus :
- a. Fasilitasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (saber pungli);
 - b. Survei Penilaian Integritas (SPI);
 - c. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi(PMPRB);
 - d. Penanganan Gratifikasi;
 - e. Penanganan Pengaduan *Wistle Blowing System (WBS)*;

- f. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 - g. Penanganan Benturan Kepentingan;
 - h. Pembangunan Zona Integritas untuk mendapat predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM); dan
 - i. Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
8. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus :
- a. *Consulting* Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah;
 - b. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP; dan
 - c. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat
Kabupaten Lombok Tengah

| NO | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisa |
|----------|--|----------------------|----------|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi | | | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| 2 | Level Maturitas SPIP | | | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | |
| 3 | Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai SAKIP B-AA | | | 74% | 76% | 78% | 80% | 74% | 76% | 78% | 80% | |
| 4 | Opini BPK | | | WTP Predikat | WTP Predikat | WTP Predikat | WTP Predikat | WTP Predikat | WTP Predikat | WTP Predikat | WTP Predikat | |
| 5 | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 6 | Persentase Capaian Korsupgah MCP-KPK | | | 75% | 80% | 85% | 90% | 75% | 80% | 85% | 90% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 7 | Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 8 | Persentase OPD dengan hasil evaluasi SPIP Level 3 | | | 74% | 76% | 78% | 80% | 74% | 76% | 78% | 80% | |
| 9 | Persentase realisasi PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 10 | Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah | | | 35% | 40% | 45% | 50% | 35% | 40% | 45% | 50% | |
| 11 | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | |
| 12 | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | | | 127 | 217 | 127 | 127 | 127 | 217 | 127 | 127 | |
| 13 | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 15 | Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 16 | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 17 | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 18 | Persentase pengawasan tujuan tertentu yang terselesaikan | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 19 | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 20 | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 21 | Nilai SAKIP OPD | | | B Predikat | B Predikat | B Predikat | B Predikat | B Predikat | B Predikat | B Predikat | B Predikat | |
| 22 | Persentase evaluasi SAKIP OPD yang tepat waktu | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 23 | Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD | | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 24 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 25 | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 26 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 27 | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 29 | Dokumen administrasi keuangan PD | | | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 30 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 31 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| 32 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 33 | Laporan keuangan triwulanan | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 34 | Laporan keuangan semesteran | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 35 | Persentase SDM Dengan Capaian Kinerja Lebih Dari Sama Dengan 80% | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 36 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 37 | Laporan administrasi umum PD | | | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 38 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | Printer | | | - | 5 | - | 7 | - | 5 | - | 7 | |
| 40 | Laptop | | | - | 60 | - | - | - | 60 | - | - | |
| 41 | Alat kebersihan | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 42 | Peralatan dan perlengkapan lainnya | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 43 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 44 | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 45 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 46 | BMD Tercatat | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 47 | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| 48 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 49 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 50 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | Layanan pemerintahan daerah | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|--|
| 52 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | 200 Mbps | 1 | 1 | 1 | 200 Mbps | 1 | 1 | 1 | |
| 53 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 54 | BMD Kondisi Baik | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 55 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 56 | STNK kendaraan dinas yang diperbaharui | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 57 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 58 | STNK kendaraan operasional yang diperbaharui | | | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 59 | Level Kapabilitas APIP | | | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | |
| 60 | Persentase Perangkat Daerah yang menyusun manajemen risiko dengan kategori Maturitas terdefinisi, terkelola dan terukur | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|------|--|
| 61 | Persentase <i>Area Of Improvement (AOI)</i> Kapabilitas APIP yang dipenuhi | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 62 | Persentase Perangkat Daerah Sampel dengan Nilai PMPRB Baik | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 63 | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | | | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | |
| 64 | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | | | - | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | |
| 65 | Persentase Peningkatan Level Maturitas Pemerintah Daerah | | | 84,23% | 90,91% | 95,45% | 100% | 84,23% | 90,91% | 95,45% | 100% | |
| 66 | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 67 | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 68 | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|----|----|----|---|----|----|----|--|
| 69 | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | - | 32 | 32 | 32 | - | 32 | 32 | 32 | |
|----|--|--|--|---|----|----|----|---|----|----|----|--|

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Lombok Tengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah :

1. Implementasi SPIP pada Perangkat Daerah masih lemah yang diakibatkan belum tersusunya Peta Resiko Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Peta Resiko Fraud / kecurangan sebagai mitigasi awal setiap OPD atas pelaksanaan Program/Kegiatan;
2. Tingginya tuntutan peran APIP dalam mengawal penerapan SPIP dan *good governance* serta Pergeseran paradigma peran APIP dalam bidang pengawasan dari *watchdog* menjadi *quality assurance* dan *consulting partner* yang menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan namun belum sepenuhnya didukung dengan kondisi APIP yang memadai dan terbatasnya anggaran Peningkatan Kapasitas APIP;
3. Lambatnya Perangkat Daerah dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
4. Masih dijumpainya temuan hasil pemeriksaan yang berulang pada Perangkat Daerah;
5. Pengawasan Inspektorat Daerah belum sepenuhnya berbasis Teknologi Informasi.

Dalam rangka mewujudkan isu strategis yang ada di Inspektorat, keadaan yang diinginkan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah adalah :

1. Meningkatnya komitmen Seluruh Jajaran Pimpinan SKPD di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tentang pentingnya Implementasi Sistem Pengendalian Intern, sebagai bentuk pengawasan melekat dalam lingkup SKPD;
2. Meningkatnya Profesionalisme APIP dalam menjalankan peran sebagai *Quality Assurance dan Consulting Partner* bagi SKPD dengan melaksanakan metode pemeriksaan yang komprehensif, analisis data yang akurat, laporan hasil pemeriksaan yang informatif dan berkualitas dengan tercukupinya Sumber Daya Manusia APIP baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
3. Meningkatnya kesadaran Perangkat Daerah sebagai Auditan / obyek pemeriksaan maupun Rekanan / Pihak Ketiga dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) oleh APIP dan Aparat pengawas eksternal seperti BPK serta meningkatnya efektifitas kerjasama penanganan TLHP dengan pihak-pihak terkait;
4. Optimalisasi implementasi SPIP pada semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sehingga memperkuat sistem pengawasan melekat pada seluruh Birokrasi sehingga tidak akan terjadi penyelewangan yang berakibat pada temuan hasil pemeriksaan yang terus berulang setiap kali ada pemeriksaan;
5. Tercukupinya Anggaran Bidang Pengawasan untuk membangun sistem pengawasan Inspektorat Daerah berbasis teknologi informasi (IT) dalam rangka mewujudkan pengawasan Inspektorat yang lebih efektif dan efisien.

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat tidak terlepas dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang diangkat serta program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam RKPD dimaksud. Dalam rangka penguatan bidang pengawasan, Inspektorat fokus mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*). Disamping itu, adanya kebijakan pemerintah berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Lombok Tengah

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | |
|----|---|-------------------------|--|----------------|---------------------|---|-------------------------|--|----------------|---------------------|-----------------|
| | Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp) | Catatan Penting |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Kabupaten Lombok Tengah | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan | 95% | 5,074,519,925.00 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Kabupaten Lombok Tengah | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan | 95% | 1,571,322,300.00 | |
| 2 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Kabupaten Lombok Tengah | Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah | 45% | 4,551,799,925.00 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Kabupaten Lombok Tengah | Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah | 40% | 2,268,150,713.00 | |
| 3 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Kabupaten Lombok Tengah | Persentase pengawasan tujuan tertentu yang terselesaikan | 100% | 522,720,000.00 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Kabupaten Lombok Tengah | Persentase pengawasan tujuan tertentu yang terselesaikan | 100% | 410,671,000.00 | |
| 4 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 18,687,240.00 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2,263,352.00 | |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- | 1 Dokumen | 3,920,400.00 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- | 1 Dokumen | 3,190,700.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|--|-----------|-------------------|---|-------------------------|--|-----------|------------------|--|
| | | | SKPD | | | | | SKPD | | | |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 3,920,400.00 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2,964,670.00 | |
| 7 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 3,920,400.00 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 3,805,700.00 | |
| 8 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 3,920,400.00 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 2,983,480.00 | |
| 9 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Laporan | 24,077,790.00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Laporan | 2,000,000.00 | |
| 10 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | 12,017,741,458.00 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | 9,762,703,101.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|--|------------|----------------|---|-------------------------|--|------------|----------------|--|
| 11 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 63,022,504.00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 23,244,000.00 | |
| 12 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 40 Orang | 300,884,000.00 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 40 Orang | 170,957,312.00 | |
| 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | 73,553,100.00 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 74,996,846.00 | |
| 14 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 48 Paket | 71,874,000.00 | | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 48 Paket | 27,184,968.00 | |
| 15 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 131,497,476.00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 151,668,000.00 | |
| 16 | Pengadaan Mebel | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 4 Unit | 121,000,000.00 | Pengadaan Mebel | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 4 Unit | 65,217,018.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------------------|---|---------------------|----------------|---|-------------------------|---|---------------------|----------------|
| 17 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Laporan | 12,100,000.00 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Laporan | 45,228,798.00 |
| 18 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 35 Unit | 256,053,600.00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 35 Unit | 98,254,860.00 |
| 19 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 32 Perangkat Daerah | 153,849,278.00 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 32 Perangkat Daerah | 296,286,835.00 |
| 20 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 12 Kegiatan | 653,100,537.00 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Kabupaten Lombok Tengah | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 12 Kegiatan | 477,549,508.00 |

2.5 Penelaahan Usulan dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah selama ini didasarkan pada arahan dan pedoman kebijakan program pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri dan kebijakan program pengawasan dari Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga, dikarenakan tugas pokok Inspektorat dalam bidang pengawasan, secara spesifik Inspektorat Daerah tidak menampung usulan program dan kegiatan dari Masyarakat.

Namun seiring dengan tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dari masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap birokrasi di Indonesia maka peran Inspektorat menjadi sangat penting. Selain itu, kemajuanteknologi yang semakin pesat dan maraknya penggunaan media sosial, nilai-nilai transparansi dalam tata kelola pemerintahan menjadi hal yang wajib dipenuhi.

Masyarakat menuntut pertanggungjawaban atas tata kelola pemerintahan pemerintahan pada umumnya, dan pengelolaan keuangan pada khususnya dapat diakses oleh masyarakat untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan. Akibatnya, ketika terjadi indikasi adanya penyelewengan atas pengelolaan keuangan masyarakat akan langsung bereraksi dengan melaporkan kepada pihak-pihak yang dianggap berkompeten dalam bidang pengawasan. Disinilah peran Inspektorat dalam mengakomodir pengaduan dan aspirasi yang datang dari masyarakat, baik yang melalui Bupati, Inspektorat Daerah secara langsung maupun melalui Pihak-pihak eksternal, seperti Aparat Penagak Hukum (APH)

Pengaduan dari masyarakat akan ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi awal tentang kebenaran informasi yang dilaporkan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pemeriksaan dilapangan. Disini Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah membuka seluas-luasnya setiap pengaduan masyarakat asalkan sesuai dengan peraturan perundangan dan prosedur yang sesuai.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Kementerian Dalam Negeri

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam satu periode ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden “*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*”, yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi;

3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuanyang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut :

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa;
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka mencapai tujuan yang ketiga yang selaras dengan peran Inspektorat Daerah, maka untuk mewujudkan tujuan, ditetapkan Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri;
2. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan Indikator Sasaran Strategis

sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :

(1) Indeks Pengawasan Internal;

(2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.

3. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Dari hasil telaah tersebut, maka peran Inspektorat Daerah dalam mengawal jalannya pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sangat relevan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama Tahun 2021 – 2026, dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024
Kabupaten Lombok Tengah

| No | Tujuan | | Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | 2023 | 2024 |
|----|--------|---|----------------------------------|--|--------------|--------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | T | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan | | Indeks Reformasi Birokrasi | B | B |
| 2 | T.1 | Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah | | Level Maturitas SPIP | Level 3 | Level 3 |
| 3 | | | Meningkatnya Kualitas Pengawasan | Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai SAKIP B-AA | 76% | 78% |
| 4 | | | | Opini BPK | WTP Predikat | WTP Predikat |
| 5 | | | | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan | 95% | 95% |
| 6 | | | | Persentase Capaian Korsupgah MCP-KPK | 80% | 85% |
| 7 | | | | Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti | 100% | 100% |
| 8 | | | | Persentase OPD dengan hasil evaluasi SPIP Level 3 | 76% | 78% |
| 9 | | | | Persentase realisasi PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------------|-------------------|
| 10 | | | | Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah | 40% | 45% |
| 11 | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | 241 Laporan | 241 Laporan |
| 12 | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | 127 Laporan | 127 Laporan |
| 13 | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan |
| 14 | | | | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | 7 Laporan | 7 Laporan |
| 15 | | | | Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan | 2 Laporan | 2 Laporan |
| 16 | | | | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | - | - |
| 17 | | | | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 250 Dokumen | 250 Dokumen |
| 18 | | | | Persentase pengawasan tujuan tertentu yang terselesaikan | 100% | 100% |
| 19 | | | | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | 12 Laporan | 12 Laporan |
| 20 | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | 12 Laporan | 12 Laporan |
| 21 | | | | Nilai SAKIP OPD | B Predikat | B Predikat |
| 22 | | | | Persentase evaluasi SAKIP OPD yang tepat waktu | 100% | 100% |
| 23 | | | | <i>Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD</i> | 13 Dokumen | 13 Dokumen |

| | | | | | |
|----|--|--|--|-------------------|-------------------|
| 24 | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen |
| 25 | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 26 | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 27 | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 28 | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 29 | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Laporan | 7 Laporan |
| 30 | | | <i>Dokumen administrasi keuangan PD</i> | 19 Dokumen | 19 Dokumen |
| 31 | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 Bulan | 12 Bulan |
| 32 | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan |

| | | | | | |
|----|--|--|---|-------------------|-------------------|
| 33 | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan |
| 34 | | | Laporan keuangan triwulanan | 4 Dokumen | 4 Dokumen |
| 35 | | | Laporan keuangan semesteran | 2 Dokumen | 2 Dokumen |
| 36 | | | Persentase SDM Dengan Capaian Kinerja Lebih Dari Sama Dengan 80% | 100% | 100% |
| 37 | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 40 Orang | 40 Orang |
| 38 | | | Laporan administrasi umum PD | 60 Laporan | 60 Laporan |
| 39 | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | - | - |
| 40 | | | Printer | 5 | - |
| 41 | | | Laptop | 60 Unit | - |
| 42 | | | Alat kebersihan | 5 Jenis | 5 Jenis |
| 43 | | | Peralatan dan perlengkapan lainnya | 6 Jenis | 6 Jenis |
| 44 | | | Laporan Hasil Rapat | | |
| 45 | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 48 Paket | 48 Paket |
| 46 | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket |

| | | | | | |
|----|--|--|--|-----------------|-----------------|
| 47 | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan |
| 48 | | | <i>BMD Tercatat</i> | 4 Jenis | 4 Jenis |
| 49 | | | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 1 Unit | - |
| 50 | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | - | 1 Unit |
| 51 | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 4 Unit | 4 Unit |
| 52 | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | - |
| 53 | | | <i>Layanan pemerintahan daerah</i> | 12 Jenis | 12 Jenis |
| 54 | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan |
| 55 | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 Laporan | 10 Laporan |
| 56 | | | <i>BMD Kondisi Baik</i> | 2 Jenis | 2 Jenis |
| 57 | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 Unit | 7 Unit |
| 58 | | | STNK kendaraan dinas yang diperbaharui | 7 Unit | 7 Unit |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|--|---------------------|---------------------|
| 59 | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 35 Unit | 35 Unit |
| 60 | | | | STNK kendaraan operasional yang diperbaharui | 35 Unit | 35 Unit |
| 61 | | | Meningkatnya Pengendalian Internal | Level Kapabilitas APIP | Level 3 | Level 3 |
| 62 | | | | Persentase Perangkat Daerah yang menyusun manajemen risiko dengan kategori Maturitas terdefinisi, terkelola dan terukur | 100% | 100% |
| 63 | | | | Persentase <i>Area Of Improvement (AOI)</i> Kapabilitas APIP yang dipenuhi | 100% | 100% |
| 64 | | | | Persentase Perangkat Daerah Sampel dengan Nilai PMPRB Baik | 100% | 100% |
| 65 | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | 2 Rekomendasi | 2 Rekomendasi |
| 66 | | | | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | 2 Rekomendasi | 2 Rekomendasi |
| 67 | | | | Persentase Peningkatan Level Maturitas Pemerintah Daerah | 90,91% | 95,45% |
| 68 | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | 32 Perangkat Daerah | 32 Perangkat Daerah |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---------------------|---------------------|
| 69 | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 10 Perangkat Daerah | 10 Perangkat Daerah |
| 70 | | | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 12 Kegiatan | 12 Kegiatan |
| 71 | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 32 Perangkat Daerah | 32 Perangkat Daerah |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah selama lima tahun kedepan (2021 – 2026) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Inspektorat dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan. Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan serta mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Inspektorat menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2023, yaitu sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Program Penyelenggaraan Pengawasan;

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;

Pendampingan dan Asistensi.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Lombok Tengah

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/kegiatan(output)/sub kegiatan (output) | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2025 | |
|-------------------|--|---|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 6.01.02 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan | Kabupaten Lombok Tengah | 95% | 2,678,821,713.00 | DAU | | 95% | 3,384,376,647.00 |
| 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah | Kabupaten Lombok Tengah | 45% | 2,268,150,713.00 | DAU | | 45% | 2,871,035,597.00 |
| 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Laporan Dokumen Hasil Audit | Kabupaten Lombok Tengah | 250 | 1,571,322,300.00 | DAU | | 250 | 2,000,000,000.00 |
| | Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | Kabupaten Lombok Tengah | 127 | | DAU | | 127 | |
| | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | Kabupaten Lombok Tengah | 1 | | DAU | | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------------|-------------------|--------------------------|-----|--|-------------------|--------------------------|
| | Reviu Laporan Kinerja | Laporan Hasil Reviu RKA, Renja, RKPD, LPPD, RPJMD, Renstra, Penyerapan Anggaran, PMPRB | Kabupaten Lombok Tengah | 7 | | DAU | | 7 | |
| | Reviu Laporan Keuangan | Laporan Hasil Reviu LKPD, KUA PPAS | Kabupaten Lombok Tengah | 10 | | DAU | | 10 | |
| | Kerjasama Pengawasan Internal | Jumlah Dokumen Audit (Joint Audit) | Kabupaten Lombok Tengah | 2 | | DAU | | 2 | |
| | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Rekomendasi yang dtindaklanjuti | Kabupaten Lombok Tengah | 1250 | 696,828,413.00 | DAU | | 1250 | 871,035,597.00 |
| 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Persentase pengawasan tujuan tertentu yang terselesaikan | Kabupaten Lombok Tengah | 100% | 410,671,000.00 | DAU | | 100% | 513,341,050.00 |
| | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | Kabupaten Lombok Tengah | 12 | | DAU | | 12 | |
| 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti | Kabupaten Lombok Tengah | 12 | 410,671,000.00 | DAU | | 12 | 513,341,050.00 |
| 6.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP OPD | Kabupaten Lombok Tengah | B Predikat | 10,436,662,805.00 | DAU | | B Predikat | 14,133,206,689.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------------|-------------|----------------------|------------|--|-------------|----------------------|
| | | Persentase evaluasi SAKIP OPD yang tepat waktu | Kabupaten Lombok Tengah | 100% | | DAU | | 100% | |
| 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD | Kabupaten Lombok Tengah | 13 | 17,207,902.00 | DAU | | 13 | 27,827,812.00 |
| 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen perencanaan PD | Kabupaten Lombok Tengah | 2 | 2,263,352.00 | DAU | | 2 | 2,827,812.00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen RKA-SKPD | Kabupaten Lombok Tengah | 1 | 3,190,700.00 | DAU | | 1 | 5,000,000.00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kabupaten Lombok Tengah | 1 | 2,964,670.00 | DAU | | 1 | 5,000,000.00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | DPA-SKPD | Kabupaten Lombok Tengah | 1 | 3,805,700.00 | DAU | | 1 | 5,000,000.00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Perubahan DPA-SKPD | Kabupaten Lombok Tengah | 1 | 2,983,480.00 | DAU | | 1 | 5,000,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------------|----|------------------|-----|--|----|-------------------|
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan kinerja SKPD (LPPD, LKjIP, Lap. Penyerapan Anggaran Triwulan, Lap. Pegawai dan Aset) | Kabupaten Lombok Tengah | 7 | 2,000,000.00 | DAU | | 7 | 5,000,000.00 |
| 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen administrasi keuangan PD | Kabupaten Lombok Tengah | 19 | 9,785,947,101.00 | DAU | | 19 | 12,230,378,877.00 |
| 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | Kabupaten Lombok Tengah | 12 | 9,762,703,101.00 | DAU | | 12 | 12,203,378,877.00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan keuangan akhir tahun SKPD | Kabupaten Lombok Tengah | 1 | | DAU | | 1 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan keuangan bulanan | Kabupaten Lombok Tengah | 12 | 23,244,000.00 | DAU | | 12 | 27,000,000.00 |
| | | Laporan keuangan triwulanan | Kabupaten Lombok Tengah | 4 | | DAU | | 4 | |
| | | Laporan keuangan semesteran | Kabupaten Lombok Tengah | 2 | | DAU | | 2 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|-------------------------|-------------|-----------------------|------------|--|-------------|-----------------------|
| 6.01..01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase SDM Dengan Capaian Kinerja Lebih Dari Sama Dengan 80% | Kabupaten Lombok Tengah | 100% | 170,957,312.00 | DAU | | 100% | 500,000,000.00 |
| 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Peserta diklat JFA dan PPUPD | Kabupaten Lombok Tengah | 192 | 170,957,312.00 | DAU | | 192 | 500,000,000.00 |
| 6.01..01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Laporan administrasi umum PD | Kabupaten Lombok Tengah | 60 | 253,849,814.00 | DAU | | 60 | 650,000,000.00 |
| 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Komputer dan perlengkapannya | Kabupaten Lombok Tengah | 6 | 74,996,846.00 | DAU | | 6 | 100,000,000.00 |
| | | Printer | Kabupaten Lombok Tengah | 0 | | DAU | | 0 | |
| | | Laptop | Kabupaten Lombok Tengah | 60 | | DAU | | 60 | |
| | | Alat kebersihan | Kabupaten Lombok Tengah | 5 | | DAU | | 5 | |
| | | Peralatan dan perlengkapan lainnya | Kabupaten Lombok Tengah | 6 | | DAU | | 6 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Laporan Hasil Rapat | Kabupaten Lombok Tengah | 48 | 27,184,968.00 | DAU | | 48 | 50,000,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|-------------------------|----------|-----------------------|------------|--|----------|-----------------------|
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang cetakan | Kabupaten Lombok Tengah | 2 | | DAU | | 2 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi | Kabupaten Lombok Tengah | 12 | 151,668,000.00 | DAU | | 12 | 500,000,000.00 |
| 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | BMD Tercatat | Kabupaten Lombok Tengah | 4 | 110,445,816.00 | DAU | | 4 | 600,000,000.00 |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan dinas | Kabupaten Lombok Tengah | 0 | | DAU | | 0 | |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan operasional | Kabupaten Lombok Tengah | 0 | | DAU | | 0 | |
| | Pengadaan Mebel | Mebel | Kabupaten Lombok Tengah | 2 | 65,217,018.00 | DAU | | 2 | 100,000,000.00 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sarana gedung kantor | Kabupaten Lombok Tengah | 0 | | DAU | | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|-------------------------|----|---------------|-----|--|----|----------------|
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kabupaten Lombok Tengah | 19 | 45,228,798.00 | DAU | | 19 | 500,000,000.00 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Layanan pemerintahan daerah | Kabupaten Lombok Tengah | 12 | | DAU | | 12 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Layanan internet | Kabupaten Lombok Tengah | 1 | | DAU | | 1 | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan perlengkapan kantor yang diservice | Kabupaten Lombok Tengah | 0 | | DAU | | 0 | |
| 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | BMD Kondisi Baik | Kabupaten Lombok Tengah | 2 | 98,254,860.00 | DAU | | 2 | 125,000,000.00 |
| 6.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan dinas terpelihara | Kabupaten Lombok Tengah | 7 | | DAU | | 7 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---|--|-------------------------|-------------|-----------------------|------------|--|-------------|-----------------------|
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan operasional terpelihara | Kabupaten Lombok Tengah | 35 | | DAU | | 35 | |
| 6.01.03 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Persentase Perangkat Daerah yang menyusun manajemen risiko dengan kategori Maturitas terdefinisi, terkelola dan terukur | Kabupaten Lombok Tengah | 100% | 477,549,508.00 | DAU | | 100% | 961,099,164.00 |
| | | Persentase Area Of Improvement (AOI) Kapabilitas APIP yang dipenuhi | Kabupaten Lombok Tengah | 100% | | DAU | | 100% | |
| | | Persentase Perangkat Daerah Sampel dengan Nilai PMPRB Baik | Kabupaten Lombok Tengah | 100% | | DAU | | 100% | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | | Kabupaten Lombok Tengah | | | DAU | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------------|-------------|--|------------|--|-------------|--|
| | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Pengawasan | Kabupaten Lombok Tengah | 8 | | DAU | | 8 | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Fasilitasi Pengawasan | Kabupaten Lombok Tengah | 8 | | DAU | | 8 | |
| 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | Persentase Peningkatan Level Maturitas Pemerintah Daerah | Kabupaten Lombok Tengah | 100% | | DAU | | 100% | |
| 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi | Kabupaten Lombok Tengah | 32 | | DAU | | 32 | |
| | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Laporan yang di Evaluasi | Kabupaten Lombok Tengah | 10 | | DAU | | 10 | |
| | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Laporan Kegiatan Saber Pungli | Kabupaten Lombok Tengah | 12 | | DAU | | 12 | |
| | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Kabupaten Lombok Tengah | 32 | | DAU | | 32 | |

BAB V

PENUTUP

V.1. Penutup

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 merupakan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026 dan merupakan suatu kajian yang sesuai dengan perubahan-perubahan lingkungan internal maupun eksternal organisasi.

Rencana Kerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 untuk mendorong tercapainya visi dan misi Bupati Lombok Tengah secara bertahap melalui ketepatan dan kepatuhan pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana kerja ini akan dapat dilaksanakan dan akan bisa mencapai apa yang diharapkan apabila mendapat dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Daerah serta seluruh aparatur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2024 ini dibuat, akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Praya, Juli 2023

INSPEKTUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,


Drs. H. Lalu Aknal Afandi, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196812311989031065

